



PT. JAMKRIDA KALSEL

RKAB 2025

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

"Membangun bisnis yang berdampak
bagi keuntungan perusahaan dan
keberlanjutan lingkungan"

ANGGOTA DARI :



TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH :



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



AmankanBersama
PENJAMINAN



SINERGI
**blud
bumd**
UNTUK BANUA

www.jamkridakalsel.co.id

0511-6723930

Jl. Haryono MT No. 31

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF	1
A. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	1
B. Visi dan Misi	2
C. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	2
D. Program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	2
E. Alokasi Sumber Daya untuk melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	7
F. Pegawai, pejabat atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	8
BAB II PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN.....	9
A. Pihak yang terlibat dalam Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	9
B. Rujukan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	9
BAB III FAKTOR PENENTU RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	10
A. Rencana Strategi Bisnis	10
B. Kapasitas Organisasi	11
C. Kondisi Keuangan	12
D. Kerjasama dengan Pihak Eksternal.....	13
E. Strategi Komunikasi.....	13
F. Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Mitigasi.....	16
G. Kebijakan Pemerintah	22
BAB IV PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	22
A. Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha	23
B. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).....	30
C. Pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor serta pembaharuan teknologi informasi	35
D. Penyaluran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	40
BAB V TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN.....	43
A. Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	43
B. Tindak lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.....	44
C. Mitigasi Risiko	45
LEMBAR PERSETUJUAN	49

BAB I

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

PT Jamkrida Kalsel merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan dan telah mendapatkan izin Perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan AHU-05101.AH.01.01.TAHUN 2014 tanggal 06 Februari 2014. Sesuai dengan rencana dan program, bahwa PT Jamkrida Kalsel resmi mulai beroperasi tanggal 17 Maret 2014 sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-22/D.05/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pemberian izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada PT Jamkrida Kalsel dan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-128/NB.213/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan kepada PT Jamkrida Kalsel.

PT Jamkrida Kalsel merupakan salah satu infrastruktur perekonomian yang kehadirannya diperlukan dalam rangka membantu permodalan UMKMK untuk mengakses permodalan ke bank atau lembaga keuangan non bank serta untuk meningkatkan tumbuh kembangnya sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengingat banyak sekali Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang potensial dalam menggerakkan roda perekonomian dan menyerap tenaga kerja, sedangkan salah satu problem Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dalam mengembangkan usahanya adalah sulitnya UMKM maupun Koperasi dalam mengakses kredit/pinjaman dari lembaga perbankan/lembaga keuangan lainnya karena tidak memiliki agunan atau agunannya tidak cukup untuk memenuhi persyaratan kredit/pinjaman yang ditetapkan oleh Bank/Lembaga Keuangan pada saat meminjam kredit, maka perusahaan penjamin kredit adalah solusinya agar persyaratan *bankable* tersebut dapat dipenuhi.

Perusahaan penjaminan punya peranan penting dalam bidang industri jasa keuangan sebagai intermediasi di bidang penjaminan kredit antara pengusaha dan UMKM sebagai pihak yang membutuhkan pembiayaan dan perbankan sebagai pihak yang memberikan pembiayaan dalam upaya pengembangan UMKM di Kalimantan Selatan. Dalam mengembangkan ekspansi bisnis PT Jamkrida Kalsel dan melihat masyarakat Kalsel mayoritas muslim serta kinerja perbankan syariah kian meningkat sehingga ada potensi untuk melakukan penjaminan syariah, oleh karena itu telah dibentuk Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Kalsel yang telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor KEP-128/NB.213/2021 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Kalsel tanggal 30 Desember 2021.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan, PT Jamkrida Kalsel hadir memberikan kemudahan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam mendapatkan pinjaman dari Bank maupun Lembaga Keuangan lainnya. Sejalan dengan hal itu, OJK selaku pengawas Perusahaan Penjaminan terus mendorong terwujudnya keuangan berkelanjutan dimana UMKMK merupakan salah satu sektor yang perlu ditingkatkan pendanaannya.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT Jamkrida Kalsel adalah komitmen Perusahaan dalam upaya peningkatan akses UMKMK pada sumber pembiayaan Lembaga Keuangan di wilayah Kalimantan Selatan dalam rangka turut serta meningkatkan dan mengembangkan UMKMK guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kalimantan Selatan. PT Jamkrida Kalsel akan terus meningkatkan bisnis penjaminan baik melalui produk Penjaminan Kredit/Pembiayaan Produktif, Non Produktif, dan Penjaminan *Suretyship*. PT Jamkrida Kalsel hingga kini dengan konsisten terus berinovasi mengembangkan layanan, dan memberikan penjaminan produk-produk yang mampu mendorong perkembangan perekonomian Kalimantan Selatan.

B. Visi dan Misi

VISI

Menjadi Perusahaan Penjaminan yang Sehat dan Terkemuka, Ikut Berpartisipasi Membangun Ekosistem Perekonomian Daerah Kalimantan Selatan

MISI

Memberikan manfaat kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi serta pemangku kepentingan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas unggul.

C. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Jamkrida Kalsel berupaya untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia terutama di Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup serta ekosistem perekonomian daerah.

D. Program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Program penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan ini akan dilakukan secara bertahap melalui 4 (empat) fase yang akan diimplementasikan oleh PT Jamkrida Kalsel dalam menjalankan kegiatan Perusahaan sebagai berikut:

Fase I	:	Tahap persiapan pada tahun 2025
Fase II	:	Tahap implementasi awal pada tahun 2025-2026
Fase III	:	Tahap implementasi lanjutan pada tahun 2027-2028
Fase IV	:	Tahap implementasi penuh, atau tahapan dimana PT Jamkrida Kalsel ditargetkan telah mencapai visi misi keuangan berkelanjutan pada tahun 2029-

2030

PT Jamkrida Kalsel menetapkan program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan pelaksanaan dalam jangka pendek 1 (satu) tahun dan jangka panjang 5 (lima) tahun.

1. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan jangka pendek 1 (satu) tahun

Bulan	No	Target Kegiatan	Indikator Keberhasilan
Jan – Des	1	Mengoptimalkan pendapatan penjaminan kredit yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan yang telah ada saat ini seperti penjaminan untuk UMKM dan <i>Suretyship</i>	Adanya peningkatan IUP yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan dibanding tahun sebelumnya
Jan – Des	2	Melakukan literasi ke Perguruan Tinggi dan <i>gathering</i> dengan kontraktor maupun pihak SKPD melalui Asosiasi atau Perkumpulan kontraktor dalam rangka pengenalan produk PT Jamkrida Kalsel dan cara berwirausaha berkelanjutan.	Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan
Jan – Des	3	Penyaluran dana CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti salah satunya program bantuan kursi roda dan tongkat di Panti Sosial bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kalsel dan perawatan tempat ibadah serta Program beasiswa untuk program pendidikan.	Dana CSR yang disalurkan mengalami peningkatan dan kebermanfaatan
Jan – Des	4	Implementasi lingkungan hidup dalam aktivitas perusahaan (<i>Green Office</i>)	Telah diimplementasikan faktor lingkungan hidup dalam aktivitas perusahaan (<i>Green Office</i>), seperti efisiensi kertas dan <i>go digital</i> .
Jan – Des	5	Melaksanakan pelatihan keuangan berkelanjutan guna menciptakan SDM yang berkualitas.	Pelatihan 50% dari total target karyawan level eksekutif.
Jan – Des	6	Melakukan kajian risiko atas permintaan pasar untuk penjaminan kredit yang tergolong pada tujuan keuangan berkelanjutan	Kajian bisnis model dan potensi mengenai produk keuangan berkelanjutan dan adanya produk baru serta tambahan portofolio penjaminan kredit.
Jan – Des	7	Memperluas jangkauan layanan ke lebih banyak UMKM di Kalimantan Selatan dan Nasional	Ruang Lingkup Nasional

2. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan jangka panjang 5 (lima) tahun

Tahun	No	Target Kegiatan	Indikator Keberhasilan
2025	1	Mengoptimalkan pendapatan penjaminan kredit yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan yang telah ada saat ini seperti penjaminan untuk UMKM dan <i>Suretyship</i>	Adanya peningkatan IUP yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan dibanding tahun sebelumnya
	2	Melakukan literasi ke Perguruan Tinggi dan <i>gathering</i> dengan kontraktor maupun pihak SKPD	Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan

		melalui Asosiasi atau Perkumpulan kontraktor dalam rangka pengenalan produk PT Jamkrida Kalsel dan cara berwirausaha berkelanjutan.	
	3	Penyaluran dana CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti salah satunya program bantuan kursi roda dan tongkat di Panti Sosial bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kalsel dan perawatan tempat ibadah serta Program beasiswa untuk program pendidikan.	Dana CSR yang disalurkan mengalami peningkatan dan kebermanfaatan
	4	Implementasi lingkungan hidup dalam aktivitas perusahaan (<i>Green Office</i>)	Telah diimplementasikan faktor lingkungan hidup dalam aktivitas perusahaan (<i>Green Office</i>), seperti efisiensi kertas dan <i>go digital</i> .
	5	Melaksanakan pelatihan keuangan berkelanjutan guna menciptakan SDM yang berkualitas.	Pelatihan 50% dari total target karyawan level eksekutif.
	6	Melakukan kajian risiko atas permintaan pasar untuk penjaminan kredit yang tergolong pada tujuan keuangan berkelanjutan	Kajian bisnis model dan potensi mengenai produk keuangan berkelanjutan dan adanya produk baru serta tambahan portofolio penjaminan kredit.
	7	Memperluas jangkauan layanan ke lebih banyak UMKM di Kalimantan Selatan dan Nasional	Ruang Lingkup Nasional
2026	1	Meningkatkan pendapatan penjaminan kredit yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan yang telah ada saat ini seperti penjaminan untuk UMKM dan <i>Suretyship</i>	Adanya peningkatan IUP yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan dibanding tahun sebelumnya
	2	Melakukan literasi ke Perguruan Tinggi dan <i>gathering</i> dengan kontraktor maupun pihak SKPD melalui Asosiasi atau Perkumpulan kontraktor dalam rangka pengenalan produk PT Jamkrida Kalsel dan implementasi keuangan berkelanjutan untuk bisnis berkelanjutan.	Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan
	3	Penyaluran dana CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti salah satunya program bantuan kursi roda dan tongkat di Panti sosial bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kalsel dan Program beasiswa untuk program pendidikan serta program CSR kelengkapan penunjang untuk tempat ibadah, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya.	Dana CSR yang disalurkan mengalami peningkatan dan kebermanfaatan
	4	Melaksanakan pelatihan keuangan berkelanjutan guna menciptakan SDM yang berkualitas.	Pelatihan 50 % dari total target karyawan level staf.
	5	Mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif yang berbasis berkelanjutan	Produk dan Layanan Baru basis Berkelanjutan

	6	Pelatihan Divisi Akuntansi dan Divisi Bisnis dan Penjaminan terhadap kelengkapan bisnis berbasis keuangan berkelanjutan dan pengetahuan pendanaan <i>green building</i> atau berorientasi pada keberlangsungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.	Pelatihan 50% Divisi Akuntansi dan Divisi Bisnis dan Penjaminan .
	7	Digitalisasi proses bisnis dari penginputan, analisa, penerbitan sertifikat penjaminan, pengajuan dan pembayaran klaim serta pendapatan subrogasi.	Digitalisasi <i>Proces Business</i>
2027	1	Meningkatkan pendapatan penjaminan kredit yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan yang telah ada saat ini seperti penjaminan untuk UMKM dan <i>Suretyship</i>	Adanya peningkatan UP yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan dibanding tahun sebelumnya
	2	Melakukan literasi ke Perguruan Tinggi dan <i>gathering</i> dengan kontraktor maupun pihak SKPD melalui Asosiasi atau Perkumpulan kontraktor dalam rangka pengenalan produk PT Jamkrida Kalsel dan mentoring UMKM berkelanjutan	Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan
	3	Penyaluran dana CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti salah satunya program bantuan kursi roda dan tongkat di Panti Sosial bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kalsel dan Program beasiswa untuk program pendidikan serta program pembuatan <i>Landmark</i> di pusat Kota di Prov. Kalsel.	Dana CSR yang disalurkan mengalami peningkatan dan kebermanfaatan
	4	Melaksanakan pelatihan keuangan berkelanjutan guna menciptakan SDM yang berkualitas.	Pelatihan 70 % dari total target karyawan level staf.
	5	Menciptakan produk dan layanan baru yang inovatif yang berbasis berkelanjutan	Produk dan Layanan Baru basis Berkelanjutan
	6	Pelatihan Divisi Akuntansi dan Divisi Bisnis dan Penjaminan terhadap kelengkapan bisnis berbasis keuangan berkelanjutan dan pengetahuan pendanaan <i>green building</i> atau berorientasi pada keberlangsungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.	Pelatihan 70% Divisi Akuntansi dan Divisi Bisnis dan Penjaminan.
	7	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi melalui pelatihan dan asesmen lembaga sertifikasi penjaminan kredit.	Standar kompetensi LSP
	8	Peningkatan kesadaran karyawan akan keuangan berkelanjutan.	Berkurangnya biaya listrik, air dan penggunaan kertas sebesar 10% dari tahun sebelumnya dan kesadaran akan lingkungan.

2028	1	Meningkatkan pendapatan penjaminan kredit yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan yang telah ada saat ini seperti penjaminan untuk UMKM dan <i>Suretyship</i>	Adanya peningkatan IJP yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan dibanding tahun sebelumnya
	2	Melakukan literasi ke Perguruan Tinggi dan <i>gathering</i> dengan kontraktor maupun pihak SKPD melalui Asosiasi atau Perkumpulan kontraktor dalam rangka pengenalan produk PT Jamkrida Kalsel dan UMKM Naik kelas dengan basis berkelanjutan.	Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan
	3	Penyaluran dana CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti program CSR Program tong sampah pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Banjarmasin dan program bantuan kursi roda dan tongkat di Panti Sosial bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kalsel dan Program beasiswa untuk program pendidikan.	Dana CSR yang disalurkan mengalami peningkatan dan kebermanfaatan serta program CSR Tong Sampah.
	4	Melaksanakan pelatihan keuangan berkelanjutan guna menciptakan SDM yang berkualitas.	Pelatihan 100 % dari total target karyawan level staf.
	5	Menanamkan Kesadaran dan senantiasa melakukan pembinaan kepada terjamin untuk melaksanakan prinsip-prinsip keberlanjutan atas proyek yang telah/akan dijamin jamkrida.	Debitur menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan atas proyek yang telah/akan dijamin Jamkrida.
	6	Digitalisasi pelayanan penjaminan kredit.	Digitalisasi proses bisnis penjaminan kredit <i>suretyship</i> melalui aplikasi.
2029	1	Meningkatkan pendapatan penjaminan kredit yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan yang telah ada saat ini seperti penjaminan untuk UMKM dan <i>Suretyship</i>	Adanya peningkatan IJP yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan dibanding tahun sebelumnya
	2	Melakukan literasi ke Perguruan Tinggi dan <i>gathering</i> dengan kontraktor maupun pihak SKPD melalui Asosiasi atau Perkumpulan kontraktor dalam rangka pengenalan produk PT Jamkrida Kalsel dan mentoring UMKM berkelanjutan	Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan
	3	Penyaluran dana CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan dan CSR Ruang Baca di Jamkrida Kalsel dan program bantuan kursi roda dan tongkat di Panti Sosial bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kalsel dan Program beasiswa untuk program pendidikan.	Terealisasinya ruang baca yang khusus memberikan pengetahuan penjaminan kredit dan keuangan berkelanjutan bagi masyarakat
	4	Meluncurkan program edukasi dan pendampingan bagi UMKM.	Program Pendampingan/Sosialisasi Pelatihan Musik Panting

	5	Bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mempromosikan program keuangan berkelanjutan bagi UMKM.	Program keuangan berkelanjutan UMKM-K
	6	Pemberian insentif kepada terjamin yang mampu menerapkan prinsip keberlanjutan atas penjaminan kredit terhadap pendanaan yang diterimanya.	Terjamin mampu menerapkan prinsip keberlanjutan atas penjaminan kredit terhadap pendanaan yang diterimanya
	7	Menjadi pemimpin dalam keuangan berkelanjutan di Aspenda dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang keuangan berkelanjutan dengan perusahaan lain.	Leader Keuangan Berkelanjutan di Aspenda
2030	1	Meningkatkan pendapatan penjaminan kredit yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan yang telah ada saat ini seperti penjaminan untuk UMKM dan <i>Suretyship</i>	Adanya peningkatan IJP yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan dibanding tahun sebelumnya
	2	Melakukan literasi ke Perguruan Tinggi dan <i>gathering</i> dengan kontraktor maupun pihak SKPD melalui Asosiasi atau Perkumpulan kontraktor dalam rangka pengenalan produk PT Jamkrida Kalsei dan mentoring UMKM berkelanjutan	Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan
	3	Penyaluran dana CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan serta CSR program bantuan untuk panti asuhan dan panti sosial bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kalsel dan Program beasiswa untuk program pendidikan.	Terealisasinya ruang baca yang khusus memberikan pengetahuan penjaminan kredit dan keuangan berkelanjutan bagi masyarakat
	4	Meluncurkan program edukasi dan pendampingan bagi UMKM secara elektronik	Program Pendampingan
	5	Bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mempromosikan program keuangan berkelanjutan bagi UMKM.	Program keuangan berkelanjutan UMKM-K
	6	Menjadi pemimpin dalam keuangan berkelanjutan di Aspenda dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang keuangan berkelanjutan dengan perusahaan lain.	Leader Keuangan Berkelanjutan di Aspenda
	7	Memberikan pendampingan dan pelatihan untuk Terjamin UMKM sehingga menjadi UMKM Naik Kelas	UMKM Naik Kelas

E. Alokasi Sumber Daya untuk melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Pelaksanaan kegiatan di atas membutuhkan dana yang bersumber dari internal perusahaan (dana operasional, biaya promosi dan biaya CSR) dan/atau dana kemitraan. Kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan oleh Divisi Penanggung Jawab kegiatan dengan melibatkan setiap unsur dalam struktur organisasinya serta membutuhkan masukan dari regulator, Auditor Eksternal maupun

lembaga konsultan/praktisi dalam implementasinya.

F. Pegawai, pejabat atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yaitu:

1. Divisi Akuntansi dan Operasional yang bertanggung jawab sebagai Ketua Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan melakukan penyesuaian sistem teknologi dan pelaporan Keuangan Berkelanjutan, melakukan pengembangan kapasitas intern pegawai terkait keuangan berkelanjutan, melaksanakan efisiensi kegiatan operasional dan mengelola program keuangan aksi berkelanjutan yang menjadi bidang tugasnya serta mengelola pelaksanaan CSR dan dokumentasi kegiatan-kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
2. Divisi Renbang & Sekper sebagai unit *support* senantiasa memonitoring dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan aktivitas/program aksi Keuangan Berkelanjutan guna meminimalisir terjadinya deviasi, disamping tugas utamanya sebagai penyusun laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) setiap tahun termasuk bekerjasama dengan divisi terkait khususnya dalam memproyeksikan rencana kegiatan yang terkategori Keuangan Berkelanjutan.
3. Divisi Bisnis dan Penjaminan melakukan penyesuaian klasifikasi kegiatan usaha PT Jamkrida Kalsel dengan kriteria kategori kegiatan usaha berkelanjutan, memproyeksikan pertumbuhan penyaluran kredit kategori kegiatan usaha berkelanjutan, merealisasikan penjaminan kredit kategori kegiatan usaha berkelanjutan, pelaporan realisasi penjaminan kredit kategori kegiatan usaha berkelanjutan, mengelola pelaksanaan program aksi Keuangan Berkelanjutan yang menjadi tugasnya (pengembangan produk).

Dalam pelaksanaanya program kerja keuangan berkelanjutan akan melibatkan lintas divisi dalam melaksanakan program yang sudah dibuat dan ditetapkan. Program yang direncanakan sudah disesuaikan dengan target yang realistis untuk dapat dicapai. Dalam hal pencapaian program kerja masing - masing unit, maka kepala divisi bertanggung jawab langsung terhadap programnya dan dilaporkan progresnya kepada Divisi Akuntansi dan Operasional.

BAB II

PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

A. Pihak yang terlibat dalam Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Bank yang dikategorikan sebagai Bank BUKU 2 memiliki kewajiban untuk menerapkan Aksi Keuangan Berkelanjutan mulai 1 Januari 2020. Sebagai bentuk penerapan kepatuhan terhadap POJK dimaksud, PT Jamkrida Kalsel melakukan proses penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025, adalah Direksi, Divisi Renbang, Sekper dan Legal, Divisi SPI, Divisi Bisnis & Penjaminan serta Divisi Akuntansi dan Operasional. Dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ini PT Jamkrida Kalsel tidak menggunakan jasa konsultan.

B. Rujukan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ini berpedoman pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta data internal Perusahaan diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *Juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan *Juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan perubahan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- e. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
- f. Rencana Bisnis PT Jamkrida Kalsel.

BAB III

FAKTOR PENENTU RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

A. Rencana Strategi Bisnis

Sejalan dengan Rencana Bisnis PT Jamkrida Kalsel akan melakukan tahap pertama terkait persiapan Aksi Keuangan Berkelanjutan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang 5 (lima) tahun

- 1) Terjalannya kerjasama baik konvensional atau unit usaha syariah dengan Bank Nasional dengan langkah melakukan pengumpulan data Bank Umum Nasional, seleksi Bank Umum Nasional yang layak diberikan Penjaminan dan melakukan penawaran serta penandatanganan PKS.
- 2) Dapat memperluas jaringan baik perluasan unit/atau cabang di wilayah Kalimantan Selatan dan mampu memasarkan seluruh produk penjaminan kredit yang sebelumnya telah dilakukan pengembangan bisnis penjaminan dibidang Suretyship, Penjaminan Non Bank ataupun Kredit program untuk Penjaminan Bank yang sebelumnya belum pernah dilakukan.
- 3) Mampu dan dapat bersaing dengan perusahaan penjaminan dan atau asuransi lainnya yang sudah berskala nasional.
- 4) Mendorong pemenuhan modal dasar perusahaan senilai 200 M.
- 5) Memperkuat dan memperluas jaringan pemasaran melalui penambahan kantor pemasaran/ unit pelayanan di beberapa kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan.
- 6) Cloud Native dengan memigrasi semua aplikasi dan data ke cloud untuk meningkatkan skalabilitas, fleksibilitas, dan efisiensi biaya.

b. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek 1 (satu) tahun

- 1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Perusahaan melalui tata Kelola perusahaan yang baik dan berbasis risiko.
- 2) Realisasi PKS dengan BPR-BPR maupun Koperasi yang berkinerja baik dan sehat di Kalimantan Selatan guna memperkuat portofolio produk penjaminan eksisting dan baru.
- 3) Mendorong sinergisitas dengan BUMD lainnya yang ada di Kalimantan Selatan yang berorientasi pada kinerja UMKM-K serta profitabilitas.
- 4) Memperkuat portofolio usaha dan investasi dengan meningkatkan hasil investasi.
- 5) Melakukan pelatihan pegawai yang efektif dan terstandarisasi sehingga menunjang proses kerja secara internal dalam peningkatan kompetensi dan produktivitas SDM.
- 6) Menjalin komunikasi, menjaga hubungan baik serta membangun suatu sistem penjaminan yang bersinergi dengan mitra kerja baik Bank Kalsel dan BPR serta Koperasi yang sudah bekerjasama guna mempermudah, mempercepat dan meningkatkan produktifitas penjaminan kredit serta terciptanya konsolidasi terkait proses permohonan penerbitan

- 7) Menjalankan pemasaran asuransi berbadan hukum yang telah mendapatkan ijin sebagai pengembangan usaha PT. Jamkrida Kalsel.
- 8) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemasaran penjaminan kredit khususnya penjaminan KUR, KUR Syariah, Surety Bond dan Bank Garansi.
- 9) Melakukan Pemasaran Penjaminan Syariah Unit Usaha Syariah dan Realisasi PKS dengan BPRS, Koperasi Syariah dan Bank Syariah Indonesia yang ada di Kalimantan Selatan.
- 10) Melakukan monitoring atas permohonan perizinan kepada OJK terkait perubahan ruang lingkup wilayah menjadi Nasional dalam rangka kolaborasi penjaminan bersama untuk dapat menjamin kegiatan proyek pembangunan IKN di Kalimantan.
- 11) Mengadakan gathering dengan kontraktor maupun pihak SKPD melalui Asosiasi atau Perkumpulan kontraktor guna meningkatkan volume penjaminan Surety Bond dan Bank Garansi.
- 12) Melakukan literasi ke Perguruan Tinggi di Kalimantan Selatan dalam rangka pengenalan produk dan perusahaan penjaminan PT. Jamkrida Kalsel.
- 13) Digitalisasi dokumen dengan mengubah dokumen fisik menjadi digital untuk mempercepat proses dan mengurangi kesalahan dan Integrasi sistem dengan menghubungkan berbagai sistem yang ada untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data.
- 14) Peningkatan Keamanan Data dengan Membatasi akses ke data hanya untuk pengguna yang berwenang dan pencegahan ancaman siber dengan melakukan pemindaian rutin terhadap sistem untuk mendeteksi dan mencegah serangan siber serta melakukan pelatihan keamanan secara berkala bagi seluruh karyawan.

Dalam upaya mencapai visi dan misi PT Jamkrida Kalsel telah melakukan penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan peraturan yang berlaku sebagai berikut:



C. Kondisi Keuangan

Posisi keuangan per Per Prognosa Desember 2024 PT Jamkrida Kalsel sebagai berikut:

a. Neraca

URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Kas dan Setara Kas	1.258.604.144,00	2.772.979.348,00	220%
Investasi	129.847.480.997,00	115.160.650.657,00	89%
Piutang Imbal Jasa Penjaminan (IJP)	0	0	0%
Aset Lancar Lainnya	1.464.256.303,00	2.016.734.751,00	138%
Aset Tetap	376.175.767,00	422.717.473,00	112%
Aset Lainnya	168.168.944.354,00	196.150.968.165,00	117%
Jumlah Aset	301.115.461.565	316.524.050.394	105%
Utang Klaim	0	0	0%
Utang Pajak	273.491.451,00	795.350.720,00	291%
Cadangan Klaim	2.656.749.590,00	1.373.598.053,00	52%
Utang Penjaminan Ulang	21.074.682.326,00	54.532.454.071,00	259%
Pendapatan ditangguhkan	154.322.767.334,00	125.206.791.282,00	81%
Surat Berharga yang diterbitkan	0	0	0%
Liabilitas Lainnya	16.672.780.456,00	30.530.478.661,00	183%
Jumlah Liabilitas	195.000.471.157	212.438.672.787	109%
Modal	102.020.000.000,00	102.020.000.000,00	100%
Cadangan Umum	2.021.308.705,00	2.614.300.471,00	129%
Cadangan Klaim	0	0	0%
Saldo Laba	2.073.681.703,00	-548.922.864,00	-26%
Jumlah Ekuitas	106.114.990.408	104.085.377.607	98%
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	301.115.461.565	316.524.050.394	105%

b. Laba Rugi

URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pendapatan IJP Bersih	14.535.903.704,00	18.621.520.503,00	128%
Pendapatan Investasi Bersih	6.241.619.031,00	5.631.980.417,00	90%
Pendapatan Lainnya Bersih	2.267.549.631,00	3.219.103.064,00	142%
Beban Klaim	7.402.399.651,00	10.670.830.839,00	144%
Beban Usaha	13.363.577.288,00	13.509.003.734,00	101%
Beban Lainnya	-	-	0%
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK	2.279.095.427	3.292.769.411	144%
BEBAN PAJAK	273.491.452	724.409.271	265%
LABA (RUGI) SETELAH BEBAN PAJAK	2.005.603.975	2.568.360.140	128%

c. Rasio Keuangan

URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Gearing Ratio	39,49	39,99	101%
Rasio Likuiditas	188	139	74%
Return Of Equity	1,89	2,47	131%
Return On Asset	2,28	1,04	46%
Rasio Klaim Terhadap IJP	51	57	112%

Rasio BOPO	130	88	68%
------------	-----	----	-----

D. Kerjasama dengan Pihak Eksternal

Dalam rangka meningkatkan portofolio PT Jamkrida Kalsel melakukan beberapa kerjasama dengan pihak eksternal sebagai berikut:



E. Strategi Komunikasi

Strategi Komunikasi Rencana Keuangan Berkelanjutan PT Jamkrida Kalsel bertujuan untuk Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan dukungan pemangku kepentingan terhadap rencana keuangan berkelanjutan PT Jamkrida Kalsel, membangun citra perusahaan yang positif dan berkomitmen terhadap keberlanjutan dan mendukung pencapaian tujuan bisnis jangka panjang PT Jamkrida Kalsel.

1. Komunikasi Internal:

Dalam rangka menciptakan iklim komunikasi internal yang kondusif untuk mendukung pencapaian kinerja serta sebagai upaya memastikan karyawan PT Jamkrida Kalsel telah terinformasikan dengan baik mengenai informasi terkini, PT Jamkrida Kalsel senantiasa melakukan aktivitas komunikasi internal dan pengelolaan media komunikasi internal diantaranya melalui sistem PT Jamkrida Kalsel dan Peraturan Perusahaan, sosialisasi rencana keuangan berkelanjutan kepada seluruh karyawan melalui pelatihan, seminar, dan media internal lainnya, dan membangun budaya sadar keuangan berkelanjutan di dalam perusahaan serta mendorong partisipasi karyawan dalam program-program keuangan berkelanjutan.

2. Komunikasi Eksternal:

PT Jamkrida Kalsel membangun komunikasi eksternal yang terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan eksternal melalui berbagai aktivitas komunikasi dan pengelolaan media komunikasi yang dimiliki sebagai berikut:

- a. Membangun komunikasi dua arah dengan nasabah dengan tujuan mengkomunikasikan produk PT Jamkrida Kalsel serta sebagai bentuk penanganan pengaduan nasabah melalui media komunikasi seperti *website*, *social media*, *call center*, ataupun tatap muka dengan pelayanan PT Jamkrida Kalsel.
- b. Menjalin hubungan baik dengan media massa untuk meningkatkan *coverage* pemberitaan positif dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai perkembangan Jamkrida Kalsel.
- c. Pengelolaan aktivitas dan media komunikasi promosi produk dan layanan PT Jamkrida Kalsel kepada masyarakat luas dengan konten menarik serta memperhatikan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Strategi Komunikasi Pihak Eksternal :

1. Bank Kalsel:

- 1) Melakukan pertemuan dengan manajemen Bank Kalsel untuk menjelaskan rencana keuangan berkelanjutan.
- 2) Menyediakan informasi dan materi edukasi tentang keuangan berkelanjutan kepada Bank Kalsel.
- 3) Bekerjasama dengan Bank Kalsel dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan berkelanjutan.

2. Penerima Jaminan:

- 1) Menyediakan informasi dan edukasi tentang keuangan berkelanjutan kepada penerima jaminan.
- 2) Menawarkan produk dan layanan keuangan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan penerima jaminan.
- 3) Membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan penerima jaminan.

3. Stakeholder:

- 1) Melakukan komunikasi proaktif dengan *stakeholder*, seperti pemerintah, LSM, dan akademisi.
- 2) Mengikuti forum dan diskusi terkait keuangan berkelanjutan.
- 3) Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mempromosikan keuangan berkelanjutan.

4. Terjamin:

- 1) Menyediakan informasi dan edukasi tentang keuangan berkelanjutan kepada terjamin.
- 2) Menawarkan produk dan layanan keuangan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan terjamin.
- 3) Membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan terjamin.

5. Masyarakat:

- 1) Melakukan kampanye publikasi tentang keuangan berkelanjutan melalui media massa, media sosial, dan kegiatan lainnya.
- 2) Mengadakan seminar dan workshop tentang keuangan berkelanjutan untuk masyarakat umum.
- 3) Bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam mempromosikan keuangan berkelanjutan.

6. UMKM atau Kontraktor:

- 1) Menyediakan informasi dan edukasi tentang keuangan berkelanjutan kepada UMKM atau kontraktor.
- 2) Menawarkan produk dan layanan keuangan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM atau kontraktor.
- 3) Membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan UMKM atau kontraktor.

3. Pengelolaan Keterbukaan Informasi

PT Jamkrida Kalsel memiliki komitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi melalui penyampaian pelaporan dan publikasi melalui berbagai media komunikasi yang sesuai dengan tata cara, jenis, dan cakupan yang telah diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yaitu Laporan Publikasi Triwulan, Laporan Publikasi Tahunan, Laporan Tahunan, dan Laporan Publikasi lainnya.

4. Kanal Komunikasi:

- Website
- Media sosial
- Laporan tahunan
- Publikasi media
- Seminar dan workshop

- Pertemuan langsung

5. Pengukuran dan Evaluasi:

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas strategi komunikasi secara berkala.
- Melakukan penyesuaian strategi komunikasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Dengan menerapkan strategi komunikasi yang efektif, PT Jamkrida Kalsel dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan pemangku kepentingan terhadap rencana keuangan berkelanjutan, membangun citra perusahaan yang positif, dan mendukung pencapaian tujuan bisnis jangka panjang. Dengan menerapkan strategi komunikasi yang tepat dan konsisten, PT Jamkrida Kalsel dapat mencapai tujuannya untuk menjadi perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

F. Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Mitigasi

1. Sistem Monitoring

Sistem monitoring dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Rencana Keuangan Berkelanjutan (RKB) dan Bisnis Berkelanjutan (BB) PT Jamkrida Kalsel dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan berkelanjutan dan bisnis berkelanjutan serta menciptakan tata kelola perusahaan yang baik di PT Jamkrida Kalsel. Dalam rangka melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program kerja seluruh unit kerja, PT Jamkrida Kalsel telah memiliki sejumlah mekanisme monitoring, antara lain:

a. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Direksi

Dalam rangka memonitoring perkembangan terkini terhadap berbagai program kerja dari seluruh unit kerja serta memonitoring kinerja keuangan dan non keuangan, PT Jamkrida Kalsel menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta Rapat Direksi.

b. *Performance Management System*

Dalam memastikan target bisnis maupun program kerja selaras dengan visi dan misi PT Jamkrida Kalsel, telah terdapat unit *Performance* dan *Management* untuk mengukur dan memonitor kinerja bisnis serta memberikan evaluasi yang lebih obyektif dan terukur sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* sehingga karyawan lebih termotivasi dalam bekerja.

c. *Business Meeting*

PT Jamkrida Kalsel melaksanakan *business meeting* secara rutin dalam rangka memonitor kinerja unit bisnis dan juga cabang.

d. *Division Meeting*

PT Jamkrida Kalsel melaksanakan *division meeting* secara rutin dalam rangka memonitor kinerja seluruh unit kerja PT Jamkrida Kalsel dan juga membahas permasalahan terkait bisnis dan juga operasional.

2. Sistem Evaluasi

- Melakukan evaluasi Rencana Keuangan Berkelanjutan (RKB) dan Bisnis Berkelanjutan (BB) secara berkala, minimal satu tahun sekali.
- Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan rencana aksi untuk mengatasinya.
- Memastikan evaluasi Rencana Keuangan Berkelanjutan (RKB) dan Bisnis Berkelanjutan (BB) dilakukan secara objektif dan independen.

Tindak Lanjut:

- Melakukan tindak lanjut atas temuan monitoring dan evaluasi.
- Mengimplementasikan rencana aksi untuk meningkatkan efektivitas Rencana Keuangan Berkelanjutan (RKB) dan Bisnis Berkelanjutan (BB).
- Melakukan komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan tentang kemajuan Rencana Keuangan Berkelanjutan (RKB) dan Bisnis Berkelanjutan (BB).

Pentingnya Sistem Monitoring yang Efektif:

- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
- Mendukung pengambilan keputusan yang tepat
- Meningkatkan efektivitas Rencana Keuangan Berkelanjutan (RKB) dan Bisnis Berkelanjutan (BB)
- Membangun kepercayaan pemangku kepentingan
- Menciptakan tata kelola perusahaan yang baik

Dengan menerapkan Sistem Monitoring dan Evaluasi yang efektif, PT Jamkrida Kalsel dapat memastikan bahwa Rencana Keuangan Berkelanjutan (RKB) dan Bisnis Berkelanjutan (BB) dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Dengan menerapkan Sistem Monitoring dan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan, PT Jamkrida Kalsel dapat menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan.

3. Mitigasi

Mitigasi yang dilakukan oleh PT Jamkrida Kalsel sebagai berikut:

1) *Three Lines of Defense*

PT Jamkrida Kalsel telah menerapkan sistem pengendalian internal yang merujuk kepada konsep *Three Lines of Defense* yang sesuai dengan *Internal Control Framework* yang melibatkan seluruh satuan kerja.

a. *First Line of Defense*

First Line of Defense dikelola oleh masing-masing unit atau satuan kerja sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan penguasaan untuk proses bisnis/kerja utama

- 2) Melakukan identifikasi dan pengukuran kembali terhadap risiko operasional utama yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.
- 3) Peningkatan kontrol dan pelaksanaan tindakan preventif yang diperlukan agar dampak dan frekuensi risiko dapat diminimalisir.

b. *Second Line of Defense*

Second Line of Defense dikelola oleh *Risk Manajement* dan *Compliance* sebagai berikut:

- 1) Peningkatan fungsi *check & balance* guna mendukung operasi bisnis yang *prudent*.
- 2) Sosialisasi program pengembangan budaya risiko dan kepatuhan kepada semua jenjang/tingkatan organisasi
- 3) Implementasi Enterprise Risk Manajement untuk mengelola risiko secara menyeluruh dan terintegrasi
- 4) Penyempurnaan kebijakan, pedoman, prosedur, dan kerangka manajemen risiko yang komprehensif.

c. *Third Line of Defense*

Third Line of Defense dikelola oleh Internal Audit sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan mekanisme *Whistleblowing System* serta kebijakannya.
- 2) Pelaksanaan review dan sosialisasi/*refreshment/role play* secara berkala untuk meningkatkan budaya sadar risiko (*Risk Awareness*) dan budaya anti fraud (*Zero Fraud & Tolerance*).
- 3) Pelaksanaan surprise audit secara berkala terhadap *auditee* yang tidak termasuk dalam Rencana Kerja Audit Tahunan.

4. **Manajemen Risiko**

a. **Pengukuran Risiko**

Pengukuran Risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya Risiko yang akan terjadi. Pengukuran Risiko dengan melakukan Penilaian Analisis Risiko.

1) **Analisis Risiko**

Tujuan analisis risiko adalah untuk memahami sifat Risiko dan karakteristiknya, termasuk jika memungkinkan, tingkat risikonya. Analisis risiko melibatkan pertimbangan mendetail terhadap ketidakpastian, sumber risiko, dampak, kemungkinan, peristiwa, skenario, kendali, dan efektivitas kendali tersebut. suatu peristiwa dapat memiliki beragam sebab dan akibat, serta dapat mempengaruhi beberapa sasaran.

Analisis risiko dapat dilakukan dengan beragam tingkat detail dan kompleksitas, bergantung pada tujuan analisis, ketersediaan sumber daya. Teknik analisis dapat kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya, bergantung pada kondisi dan penggunaan yang diharapkan.

a) **Kegiatan Analisis Risiko**

Menentukan kemungkinan dan dampak setiap risiko

b) Tujuan Analisis Risiko

- 1) Untuk memahami tingkat risiko dengan menyesuaikan analisis risiko berdasarkan pengadaan tertentu
- 2) Memberikan Skor pada kemungkinan terjadinya akar penyebab
- 3) Mengidentifikasi kemungkinan akibat dalam hal kinerja, biaya, dan jadwal
- 4) Mengidentifikasi tingkat risiko dengan menggunakan matriks risiko

c) Hasil

Kemungkinan dan dampak terdeskripsikan untuk setiap risiko yang teridentifikasi

2) Metode Penilaian (Analisis) Risiko

a) Penilaian (Analisis) Risiko Kuantitatif

Proses untuk memprioritaskan risiko untuk analisis atau Tindakan lebih lanjut dengan menilai dan menggabungkan probabilitas kejadian dan dampaknya

b) Penilaian (Analisis) Risiko Kualitatif

Analisis numeris atas efek pada tujuan proyek keseluruhan dari risiko yang teridentifikasi, dengan mempertimbangkan skala kemungkinan kerugian dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut

3) Penetapan Peringkat Risiko

a) Kegiatan

Mengevaluasi skor risiko dan memprioritaskan risiko untuk ditindaklanjuti

b) Tujuan

- 1) Melihat dan memahami keseluruhan tatanan risiko
- 2) Memahami peringkat relatif dari setiap risiko
- 3) Menggunakan sumberdaya manusia dan keuangan untuk mengurangi paparan terhadap risiko (*risk exposure*) yang dihadapi organisasi

c) Hasil

Peta Risiko yang diprioritaskan berdasarkan skor sebelum penanganan risiko

Nomor	Zona Risiko	Kategori
1	<i>Extreme</i> /Risiko Ekstrem	Pengendalian ketat atas gejala risiko, perlu mitigasi dan penanganan khusus agar risiko diterima, ditolak, atau dialihkan (<i>mitigate</i>)
2	<i>High</i> /Risiko Tinggi	Pengelolaan, pengendalian, dan monitoring risiko yang terjadi secara intensif (<i>manage</i>) seperti kepatuhan terhadap SOP dan perundang-undangan.
3	<i>Medium</i> /Risiko Moderat	Pengendalian dan minimalisasi dampak risiko secara selektif (<i>decline</i>) melalui langkah pembagian risiko kepada pihak lain (<i>risk transfer</i>).
4	<i>Low</i> /Risiko Rendah	1. Risiko diterima (<i>accept</i>); dengan upaya pengendalian dan penerimaan akibat

		risiko secara terstruktur dan sistematis. 2. Melakukan langkah-langkah pengembangan kemampuan dengan pelaksanaan pelatihan mengenai penanganan kejadian risiko.
--	--	---

b. Pengendalian Risiko

pengendalian risiko adalah upaya penerapan pengendalian yang sesuai untuk mendapatkan keseimbangan dalam hal keamanan, kegunaan, dan pembiayaan dari suatu perusahaan. Pengendalian Risiko dengan melakukan mitigasi terhadap Risiko.

1. Kegiatan

Membuat rencana untuk menangani atau memodifikasi risiko untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima dan mengimplementasikannya

2. Tujuan

Untuk Menyusun rencana penangan paparan risiko secara keseluruhan bagi organisasi

3. Strategi penanganan/ penanggulangan untuk setiap risiko (mengasumsi, memitigasi, mengalihkan, dan sebagainya).

c. Pemantauan Risiko

1. Kegiatan

Memantau, menelusuri dan meninjau risiko untuk memastikan risiko berada dalam tingkat yang dapat diterima

2. Tujuan

Untuk mengimplementasikan rencana tanggapan risiko dan pengendalian

3. Hasil

Daftar Risiko yang diperbarui secara terus menerus (Penambahan/ penghapusan/ perubahan risiko) dan rapat/laporan berkala

4. Proses Monitoring Risiko

- RISK IDENTIFICATION* : Proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi munculnya Risiko Baru.
- RISK ANALYSIS* : Analisa berkelanjutan (*sustained*) terkait munculnya : kemungkinan risiko (*probability*), dampak (*impact*), pilihan perlakuan (*treatment*) dan faktor lain seperti momen risiko dsb.
- RISK MEASUREMENT & INFORMATION* Mengukur exposure risiko saat ini dan menginformasikan risiko ini kepada pemangku kepentingan secara rutin.
- RISK CONTROLS* : Proses berkelanjutan untuk memonitor pelaksanaan pengendalian risiko, seperti : proses mitigasi risiko.

5. Penerapan pemantauan

a. Peta Risiko

	Consequences (Dampak Risiko)				
	Kecil	Sedang	Berat	Besar	Bencana
Likelihood (Kemungkinan Risiko)					
Hampir Pasti	M 5	H 10	H 15	E 20	E 25
Sering	L 4	M 8	H 12	E 16	E 20
Sedang	L 3	M 6	H 9	H 12	H 15
Sangat Jarang	L 2	L 4	M 6	M 8	H 10
Langka	L 1	L 2	L 3	L 4	M 5

Setelah penilaian risiko disatukan dalam peta risiko *inherent*, maka dibuat zona risiko yang terdiri dari 4 zona, yaitu : E = *Extreme*, H = *High*, M = *Moderate*, L = *Low*.

b. Tabel Risiko

SKOR	DERAJAT	KEMUNGKINAN
1 RENDAH	HAMPIR TIDAK MUNGKIN TERJADI	MUNGKIN TERJADI SEKALI DALAM LEBIH DARI 5 TAHUN
2	KECIL KEMUNGKINAN TERJADI	MUNGKIN TERJADI SETIAP 1 HINGGA 5 TAHUN
3	MUNGKIN TERJADI	MUNGKIN TERJADI SETIAP 6 HINGGA 12 BULAN
4	SANGAT MUNGKIN TERJADI	MUNGKIN TERJADI SETIAP 3 HINGGA 6 BULAN
5 TINGGI	HAMPIR PASTI TERJADI	MUNGKIN TERJADI SETIDAKNYA SETIAP 3 BULAN

c. Tabel Risiko

SKOR	DERAJAT	DAMPAK KEUANGAN (dari Total Anggaran)	DAMPAK ASPEK HUKUM
1	MINOR	POTENSI KERUGIAN TIDAK MATERIAL	PERBAIKAN ADMINISTRASI
2	MODERAT	POTENSI KERUGIAN CUKUP MATERIAL	PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
3	SEVERE	POTENSI KERUGIAN SANGAT MATERIAL	SANKSI PENJAMINAN
4	SIGNIFIKAN	POTENSI KERUGIAN SANGAT MATERIAL	TP/TGR
5	SANGAT SIGNIFIKAN	POTENSI KERUGIAN TIDAK DAPAT DITOLERIR	TUNTUTAN PIDANA

d. Tabel Tingkat Risiko

TINGKAT	SKOR RISIKO	TINDAKAN/RESPON
Rendah	1-4	Tangani Risiko/ Kejadian di Unit bisnis/ fungsi terkait dengan rutin pengendalian atau prosedur
Minor	5-8	Tangani risiko/ kejadian di unit bisnis/ fungsi terkait dengan Tindakan atau rencana lebih lanjut
Medium	9-15	Risiko/ Kejadian membutuhkan pencegahan atau rencana mitigasi, dimonitor oleh BOD
Tinggi	16-25	Risiko/ Kejadian membutuhkan pencegahan atau rencana mitigasi sesegera mungkin secara intensif, BOC diinformasikan

G. Kebijakan Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang telah digagas Pemerintah Daerah Pemprov Kalsel melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 dengan mengusung tema “Kalimantan Selatan Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara” dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005 – 2025 dengan mengusung tema “Maju dan Sejahtera Sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agroindustri” dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan isu Aksi Keuangan Berkelanjutan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).

BAB IV

PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

A. Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha

1. Dasar Pemikiran

a) Prioritas Implementasi Keuangan Berkelanjutan

PT Jamkrida Kalsel menetapkan prioritas implementasi Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan Pedoman Teknis POJK No. 51/POJK.03/2017 dan memperhatikan *faktor-faktor* eksternal dan internal sebagaimana telah disebutkan dalam BAB III Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025.

Dalam rangka mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam *Road Map* Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Jamkrida Kalsel 2025 – 2030.

1. Prioritas pertama adalah Pengembangan Kapasitas *Intern* PT Jamkrida Kalsel terutama penunjukan unit pengelola Keuangan Berkelanjutan (dimulai pada 2025).
2. Prioritas kedua adalah penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola dan SOP (dimulai pada 2025).
3. Prioritas ketiga adalah pengembangan produk/jasa keuangan berkelanjutan (dimulai pada 2026).

b) Analisis Bisnis Kegiatan Usaha

Strategi manajemen perlu disusun secara tepat dengan tujuan agar manajemen dapat melaksanakan pengelolaan perusahaan secara optimal. Sebagai alat bantu atau indikator untuk strategi manajemen tersebut diperlukan suatu metode analisis. Dalam karya tulis ini dikemukakan analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*). Analisa SWOT membantu membuat analisa untuk memberdayakan peluang dan mengatasi ancaman dari lingkungan eksternal dan secara bersamaan memanfaatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan dari internal. Analisa SWOT secara umum disesuaikan dengan visi dan misi PT Jamkrida Kalsel sehingga menjadi penentu arah kebijakan PT Jamkrida Kalsel. Analisis SWOT dapat digambarkan sebagai berikut:



a. Analisis Eksternal :

Beberapa Kondisi Eksternal baik secara makro dan mikro yang perlu diperhatikan :

1) Kondisi Makro

- Kondisi pengetatan likuiditas global.
- Perang dagang negara-negara adikuasa.
- Serbuan Teknologi Informasi di bidang finansial, *Financial Technology*.
- Disrupsi keuangan.

2) Kondisi Mikro

- Iklim kompetisi persaingan usaha yang sangat ketat.
- Pelemahan nilai tukar.
- Regulasi dan ketentuan-ketentuan di bidang keuangan dan perPT Jamkrida Kalselan dan non perPT Jamkrida Kalselan.
- Kerjasama broker asuransi dan perPT Jamkrida Kalselan
- Adanya tahun *politik*.

b. Analisis Internal :

Beberapa Kondisi Internal yang perlu diperhatikan:

- Beban Klaim yang semakin meningkat
- Menurunnya kinerja PT Jamkrida Kalsel
- Sumber Daya Manusia yang belum sepenuhnya terpenuhi dengan kebutuhan bisnis.
- IT dan Sistem Informasi PT Jamkrida Kalsel
- Permodalan dan pemenuhannya.

Analisa SWOT disusun berdasarkan kondisi yang terjadi di atas, maka didapat data sebagai berikut :

1. *Strength* / Kekuatan

- Hubungan PT Jamkrida Kalsel dengan Pemerintah Provinsi sebagai pemegang saham
- Hubungan PT Jamkrida dengan PT Jamkrida Kalsel Kalsel, karena keduanya adalah BUMD dan koperasi karyawan PT Jamkrida Kalsel Kalsel mempunyai saham di PT. Jamkrida.
- PT Jamkrida Kalsel memiliki *brand image* yang kuat, karena sebagai mitra UMKM dalam rangka memperoleh akses permodalan di PT Jamkrida Kalsel atau lembaga pembiayaan
- Rencana perluasan usaha PT Jamkrida Kalsel dengan membuka penjaminan syariah sangat berkesesuaian dengan karakter masyarakat Kalsel yang agamis
- Produk bersaing, dan masih dapat menyesuaikan dengan kondisi penjaminan yang ada.
- Loyalitas dan profesionalisme karyawan dinilai masih tetap terjaga

2. *Weaknesses / Kelemahan*

- Modal yang masih terbatas sehingga kegiatan penjaminan masih bersifat lokal (daerah).
- Penetrasi pasar dinilai masih belum optimal sampai ke *end user* terutama ke Dinas-Dinas pemilik proyek dan kontraktor-kontraktor.
- Keragaman produk penjaminan masih belum optimal.
- Kuantitas dan kualitas SDM yang ada masih belum optimal jika dibandingkan dengan SOTK yang ada.
- Website dan media sosial lainnya belum *up to date*.
- Teknologi yang ada masih standar dan teknologi yang ditawarkan masih jauh berada di bawah produk pesaing.
- Kecenderungan kinerja yang terus menurun.

3. *Opportunities / Peluang*

- Pengusaha UMKM terus bertumbuh seiring dengan program dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menciptakan wirausaha baru.
- Pembangunan infrastruktur terus dilakukan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi nasional
- Proyek-proyek yang dilaksanakan di daerah perlu adanya penjaminan, dan tentunya PT Jamkrida Kalsel sebagai perusahaan penjaminan daerah mengambil peranan penting dalam penjaminan proyek-proyek tersebut.
- Pengembangan produk syariah di PT Jamkrida Kalsel Kalsel membuka peluang kegiatan penjaminan PT Jamkrida Kalsel Unit usaha Syariah.

4. *Threat / Ancaman*

- Masuknya perusahaan penjaminan-penjaminan baru yang dibawa oleh broker penjamin sehingga menambah persaingan dengan perusahaan-perusahaan penjaminan yang eksisting di Kalsel .
- Pengetatan anggaran keuangan daerah.
- Bertumbuhnya *fintech* dan lembaga-lembaga pembiayaan yang tidak memerlukan penjaminan terhadap debiturnya.

Untuk mengetahui paduan analisis SWOT dapat dilihat pada diagram TOWS berikut ini :

<i>Strengths</i>		<i>Weaknesses</i>	
<i>Strengths - Oppurtunities</i>		<i>Weaknesses - Oppurtunities</i>	
<i>Oppurtunities</i>	1) Perlunya menciptakan sinergi antara perbankan atau lembaga pembiayaan, perusahaan penjamin dan pemerintah daerah terutama di dinas-dinas yang membina kelompok usaha-usaha, kelompok tani dan nelayan yang memerlukan akses permodalan di perbankan 2) Perlunya sinergi antara PT Jamkrida Kalsel dengan pemerintah daerah dalam rangka cover penjaminan untuk proyek-proyek di daerah 3) Perlunya sinergi antara PT Jamkrida Kalsel dengan Bank Kalsel sebagai <i>captive market</i> PT Jamkrida Kalsel dalam lingkup penjaminan terhadap debitur Bank Kalsel baik produk Bank Kalsel Konvensional maupun Syariah	1) Perlu adanya kajian yang komprehensif mengenai rencana bisnis dalam rangka negosiasi tambahan modal kepada <i>shareholder</i>. 2) Perlunya Sosialisasi ke dinas-dinas (pimpinan proyek) dan kontraktor mengenai produk-produk penjaminan PT Jamkrida Kalsel yang berhubungan dengan proyek-proyek (Surety Bond dll) 3) Perlunya peningkatan <i>knowledge</i> dan <i>skill</i> bagi SDM PT Jamkrida Kalsel dan menanamkan budaya kerja berbasis kinerja sehingga diharapkan kinerja yang saat ini lagi menurun dapat meningkat. 4) Meningkatkan kemampuan IT dan personil didalamnya serta mengelola media sosial (website dan media sosial lainnya) agar terus meng <i>update</i> konten media tersebut agar lebih informatif dan menjadikan medsos tersebut sebagai promosi. 5) Menanamkan GCG di lingkungan kerja dan mengimplementasikan dalam budaya kerja sehari-hari	
<i>Strengths</i>		<i>Weaknesses</i>	
<i>Strengths - threats</i>		<i>Weaknesses - threats</i>	
<i>threats</i>	1) PT Jamkrida Kalsel sebagai BUMD milik pemerintah Provinsi Kalsel maka sudah menjadi tekad bersama untuk menjadikan PT Jamkrida Kalsel menjadi Perusahaan terdepan di bidang penjaminan di Provinsi Kalsel 2) Agar terus membina hubungan baik dengan Bank dan Lembaga Pembiayaan di lingkup Provinsi Kalsel 3) Inovasi produk mengikuti perkembangan digitalisasi sehingga proses penerbitan polis dapat akurat, aman dan cepat (<i>online</i>)	Perbaikan dan penguatan kelembagaan diantaranya dengan : - Penguatan modal - Pengembangan perusahaan yang efektif dan tepat guna - Menciptakan program promosi yang komprehensif - Penyesuaian kebijakan produk dengan perkembangan produk perbankan atau lembaga pembiayaan - Pengembangan SDM yang berkualitas - Membangun <i>Business Continuity</i> - Membangun konektivitas terintegrasi antara semua	

c) Kriteria dan Alasan Pemilihan Prioritas Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Secara umum, tantangan yang dihadapi dalam implementasi keuangan berkelanjutan dari sudut pandang PT Jamkrida Kalsel adalah kondisi keuangan dan juga masih rendahnya pemahaman manajemen dan karyawan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut prioritas PT Jamkrida Kalsel adalah meningkatkan kapasitas internal terutama pemahaman atas keuangan berkelanjutan dan pembentukan unit khusus untuk pengelolaan keuangan berkelanjutan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas operasional, PT

Jamkrida Kalsel untuk tetap memperhitungkan nilai *people, profit* dan *planet* dari internal PT Jamkrida Kalsel terlebih dahulu.

d) Uraian Aktivitas Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Adapun aktivitas dari Implementasi Program Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan unit khusus pengelola keuangan berkelanjutan

Pedoman Teknis POJK No. 51/ POJK.03/2017 menyebutkan bahwa dalam rangka penyesuaian struktur organisasi dapat dilakukan dengan menambah tupoksi Keuangan Berkelanjutan pada unit yang sudah ada atau menambah unit khusus yang menjalankan program-program Keuangan Berkelanjutan.

PT Jamkrida Kalsel memutuskan untuk menambah tupoksi program pada unit Divisi Renbang, Sekper & Legal sebagai unit kerja yang akan berkoordinasi dengan seluruh unit kerja lainnya.

2. Penyusunan Pedoman Perusahaan Keuangan Berkelanjutan

Dalam rangka memastikan penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan selaras dengan berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai Keuangan Berkelanjutan dan ketentuan yang berlaku mengenai isu sosial dan lingkungan hidup, dibutuhkan suatu pedoman sebagai panduan bagi unit pengelola keuangan berkelanjutan.

3. Pelaksanaan edukasi internal bekerjasama dengan pihak eksternal seperti regulator dan lembaga/instansi lainnya.

- a) Peningkatan kapasitas pengurus terkait Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- b) Peningkatan kompetensi karyawan satuan kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- c) Melakukan pelatihan kepada Divisi Penjaminan.
- d) Pelatihan penyusunan Laporan Keberlanjutan.
- e) Kampanye peduli lingkungan kepada karyawan PT Jamkrida Kalsel.

2. Kegiatan

Adapun secara rinci, kegiatan Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah sebaga berikut:

No	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya Yang dibutuhkan	Unit yang bertanggung jawab
1	Penunjukan Unit pengelola keuangan berkelanjutan	Januari 2025	Februari 2025	Divisi Akuntansi & Operasional	Divisi Akuntansi & Operasional, Divisi Renbang & Sekper
2	Penyusunan Pedoman Perusahaan Keuangan Berkelanjutan	Januari 2025	Februari 2025	Divisi Akuntansi & Operasional, Divisi Renbang & Sekper, Divisi Bisnis & Penjaminan	Divisi Akuntansi & Operasional, Divisi Renbang & Sekper, Divisi Bisnis & Penjaminan

3	Pelaksanaan edukasi Internal	Januari 2025	Februari 2025	Divisi Akuntansi & Operasional, Divisi Renbang & Sekper, Divisi Bisnis & Penjaminan	Divisi Akuntansi & Operasional
---	------------------------------	--------------	---------------	---	--------------------------------

3. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelola aksi keuangan berkelanjutan diberikan kepada Divisi Akuntansi & Operasional bekerjasama dengan Divisi Renbang & Sekper, Divisi Bisnis & Penjaminan.

Implementasi program keuangan berkelanjutan dengan prioritas pengembangan kapasitas internal yang difokuskan pada pelatihan dan peningkatan kompetensi karyawan terhadap Aksi keuangan berkelanjutan menggunakan alokasi sumber dana dari dana pelatihan karyawan sesuai dengan Rencana Bisnis PT Jamkrida Kalsel.

Dalam penyelenggaraan pelatihan maupun pemilihan konsultan dalam penyusunan laporan keberlanjutan (apabila diperlukan) dan penyusunan laporan keberlanjutan itu sendiri, PT Jamkrida Kalsel akan menunjuk pihak ketiga dengan mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa.

4. Implementasi target dan alokasi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Aksi Keuangan Berkelanjutan, PT Jamkrida Kalsel melaksanakan program TJSL yang menekankan pada UMKM, kepedulian sosial dan pendidikan dengan menentukan target yang Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan dan Berjangka Waktu.

5. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Keberhasilan dari pelaksanaan Program dan Aktivitas Keuangan Berkelanjutan ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi Program Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan dibandingkan dengan *timeline* dan indikator kinerja lainnya yang telah direncanakan.
2. Realisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dibandingkan dengan *timeline*, anggaran dan indikator kinerja lainnya yang telah direncanakan.
3. Realisasi Penjaminan kredit kepada Kegiatan Usaha Kategori Berkelanjutan dibandingkan dengan anggaran dan indikator kinerja lainnya yang telah direncanakan.

6. Tantangan dan Rencana ke Depan

Tantangan:

- 1) Keterbatasan data dan informasi: Salah satu tantangan utama dalam penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT Jamkrida Kalsel adalah keterbatasan data dan informasi terkait dengan aspek-aspek keberlanjutan. Hal ini dapat menghambat proses pengukuran dan pelaporan kinerja RAKB.
- 2) Keterampilan dan pengetahuan: Diperlukan peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan PT Jamkrida Kalsel terkait dengan keuangan berkelanjutan dan bisnis

berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa RAKB dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

- 3) Sumber daya: Penerapan RAKB memerlukan sumber daya yang memadai, baik dalam hal keuangan maupun manusia. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi PT Jamkrida Kalsel, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit.
- 4) Kerjasama dengan pemangku kepentingan: Diperlukan kerjasama yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, regulator, industri keuangan, dan masyarakat sipil, untuk memastikan keberhasilan RAKB.
- 5) Perubahan budaya: Penerapan RAKB memerlukan perubahan budaya di PT Jamkrida Kalsel. Hal ini membutuhkan waktu dan komitmen yang kuat dari manajemen dan seluruh karyawan.

Rencana ke Depan:

- 1) Memperkuat pengumpulan data dan informasi: PT Jamkrida Kalsel terus memperkuat pengumpulan data dan informasi terkait dengan aspek-aspek keberlanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga penelitian, konsultan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- 2) Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan: PT Jamkrida Kalsel terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan terkait dengan keuangan berkelanjutan dan bisnis berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan workshop.
- 3) Mencari sumber daya pendanaan: PT Jamkrida Kalsel terus mencari sumber daya pendanaan untuk mendukung pelaksanaan RAKB. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dana hibah, pinjaman, atau investasi dari lembaga keuangan dan investor.
- 4) Memperkuat kerjasama dengan pemangku kepentingan: PT Jamkrida Kalsel terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan RAKB. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang efektif dan berkelanjutan dengan pemangku kepentingan.
- 5) Membangun budaya keberlanjutan: PT Jamkrida Kalsel terus membangun budaya keberlanjutan di dalam perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis perusahaan, budaya kerja, dan proses pengambilan keputusan.
- 6) Melakukan *benchmarking* dengan perusahaan lain: PT Jamkrida Kalsel akan melakukan *benchmarking* dengan perusahaan lain yang telah menerapkan RAKB untuk mempelajari praktik terbaik dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan RAKB sendiri.
- 7) Terus belajar dan beradaptasi: Bidang keuangan berkelanjutan dan bisnis berkelanjutan berkembang pesat. PT Jamkrida Kalsel perlu terus belajar dan beradaptasi dengan

perkembangan terbaru untuk memastikan RAKBnya tetap relevan dan efektif.

- 8) Mengkomunikasikan kemajuan RAKB: PT Jamkrida Kalsel terus mengkomunikasikan kemajuan RAKB kepada pemangku kepentingan secara berkala. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan dukungan terhadap RAKB.

B. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Dasar Pemikiran

- a. SDM yang berkualitas dan kompeten adalah aset berharga bagi perusahaan penjamin. Mereka adalah motor penggerak utama dalam mencapai tujuan perusahaan.
- b. SDM yang berkualitas dan kompeten memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.
- c. SDM yang berkualitas dan kompeten juga memiliki sikap dan perilaku yang positif, seperti disiplin, kerja keras, dan etos kerja yang tinggi.

2. Kegiatan

- a. Pelatihan dan Pengembangan
 - 1) Pelatihan teknis: Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam bidang-bidang yang terkait dengan pekerjaan mereka, seperti analisis kredit, manajemen risiko, hukum penjaminan kredit, dan *underwriting*.
 - 2) Pelatihan *soft skills*: Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam hal komunikasi, kepemimpinan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan.
 - 3) Pelatihan kepemimpinan: Pelatihan ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan para pemimpin di perusahaan penjamin.
 - 4) Program pengembangan manajemen: Program ini dirancang untuk mengembangkan talenta-talenta terbaik di perusahaan penjamin dan mempersiapkan mereka untuk posisi kepemimpinan di masa depan.
- b. Penilaian Kinerja
 - 1) Penilaian kinerja karyawan dilakukan secara berkala untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka.
 - 2) Hasil penilaian kinerja digunakan untuk memberikan *feedback* kepada karyawan dan untuk merancang program pelatihan dan pengembangan yang tepat.
 - 3) Penilaian kinerja juga dapat digunakan untuk menentukan promosi dan kenaikan gaji karyawan.
- c. Promosi dan Pengembangan

- 1) Perusahaan penjamin memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk promosi dan pengembangan karir.
- 2) Karyawan yang berprestasi dan memiliki potensi tinggi dapat dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi.
- 3) Perusahaan penjamin juga dapat memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk mengikuti program pengembangan karir, seperti program rotasi kerja dan program mentoring.

3. Sumber Daya

1. Anggaran

Perusahaan penjamin harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengembangan SDM. Anggaran harus digunakan secara efektif dan efisien.

2. Fasilitas

Perusahaan penjamin harus menyediakan fasilitas yang memadai untuk pengembangan SDM, seperti ruang pelatihan, laboratorium komputer, dan perpustakaan.

3. Tenaga Ahli

Perusahaan penjamin harus memiliki tenaga ahli yang kompeten untuk melaksanakan program pengembangan SDM. Tenaga ahli dapat berasal dari internal perusahaan atau dari luar perusahaan.

4. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

PT Jamkrida Kalsel telah berkomitmen untuk menerapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan. Salah satu komponen penting dalam RAKB adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program pelatihan dan edukasi. Untuk memastikan efektivitas program-program tersebut, diperlukan sistem evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

a. Ruang Lingkup Evaluasi:

Evaluasi ini mencakup seluruh program pengembangan SDM yang terkait dengan RAKB PT Jamkrida Kalsel, termasuk:

1. Pelatihan
2. Workshop
3. Seminar
4. Pengembangan kepemimpinan
5. *Mentoring*
6. *Coaching*

Evaluasi ini akan dilakukan dengan menggunakan metode campuran, yaitu:

a) Metode kuantitatif:

- 1) *Pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan
 - 2) Kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan terhadap program pengembangan SDM
 - 3) Analisis data kinerja karyawan untuk melihat dampak program pengembangan SDM terhadap kinerja mereka
- b) Metode kualitatif:
- 1) Wawancara dengan peserta program pengembangan SDM untuk mendapatkan masukan dan saran
 - 2) Observasi di tempat kerja untuk melihat bagaimana karyawan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari program pengembangan SDM
- b. Indikator Kinerja Utama (KPI):**
- Evaluasi ini akan menggunakan beberapa indikator kinerja utama (KPI) untuk mengukur efektivitas program pengembangan SDM, antara lain:
- a) Partisipasi:
 - 1) Jumlah karyawan yang mengikuti program pengembangan SDM
 - 2) Tingkat kepuasan karyawan terhadap program pengembangan SDM
 - b) Pengetahuan:
 - 1) Peningkatan skor *pre-test* dan *post-test*
 - 2) Kemampuan karyawan dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan bisnis berkelanjutan dalam pekerjaan mereka
 - c) Keterampilan:
 - 1) Peningkatan skor tes keterampilan
 - 2) Kemampuan karyawan dalam menggunakan alat dan teknologi yang terkait dengan keuangan berkelanjutan dan bisnis berkelanjutan
 - d) Perilaku:
 - 1) Perubahan perilaku karyawan yang terkait dengan keuangan berkelanjutan dan bisnis berkelanjutan, seperti:
 - Pengurangan konsumsi energi
 - Pengurangan penggunaan kertas
 - Peningkatan daur ulang
 - Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan sosial
 - e) Dampak:
 - 1) Kontribusi program pengembangan SDM terhadap pencapaian tujuan RAKB PT Jamkrida Kalsel

c. Pengumpulan Data:

Data untuk evaluasi ini akan dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain:

- 1) Peserta program pengembangan SDM
- 2) Atasan
- 3) Rekan kerja
- 4) Data Perusahaan

d. Analisis Data:

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan berbagai teknik analisis, antara lain:

- 1) Analisis deskriptif
- 2) Analisis statistik
- 3) Analisis kualitatif

e. Pelaporan:

Hasil evaluasi ini akan dilaporkan kepada:

- 1) Manajemen
- 2) Dewan komisaris
- 3) Peserta program pengembangan SDM
- 4) Pemangku kepentingan lainnya

f. Tindak Lanjut:

Berdasarkan hasil evaluasi ini, PT Jamkrida Kalsel akan melakukan beberapa tindak lanjut, antara lain:

- 1) Penyempurnaan program pengembangan SDM
- 2) Peningkatan efektivitas RAKB
- 3) Pengambilan keputusan terkait program pengembangan SDM
- 4) Komunikasi hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan

Evaluasi pelaksanaan program pengembangan SDM dalam RAKB PT Jamkrida Kalsel sangatlah penting untuk memastikan efektivitas program-program tersebut dan untuk mencapai tujuan RAKB secara keseluruhan. Dengan menerapkan sistem evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan, PT Jamkrida Kalsel dapat menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan SDM yang berkualitas dan berkelanjutan.

5. Tantangan dan Rencana ke Depan**1) Tantangan****a) Keterbatasan Keterampilan dan Pengetahuan:**

- 1) Kurangnya pemahaman karyawan tentang konsep keuangan berkelanjutan dan bisnis berkelanjutan.
- 2) Keterampilan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan RAKB belum memadai.

- 3) Kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi dan regulasi terkait keuangan berkelanjutan.

b) Kurangnya Budaya Keberlanjutan:

- 1) Kurangnya kesadaran dan komitmen karyawan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan.
- 2) Budaya kerja yang belum mendukung penerapan praktik-praktik berkelanjutan.
- 3) Sistem *reward* dan *punishment* yang belum selaras dengan tujuan keberlanjutan.

c) Kesulitan Mendapatkan Talenta Berkelanjutan:

- 1) Kurangnya ketersediaan talenta dengan keahlian khusus dalam keuangan berkelanjutan dan bisnis berkelanjutan.
- 2) Persaingan dengan perusahaan lain dalam mendapatkan talenta terbaik.
- 3) Gaji dan benefit yang ditawarkan belum kompetitif.

2) Rencana ke Depan

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, rencana kedepan program pengembangan SDM dalam RAKB PT Jamkrida Kalsel bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan terkait keuangan berkelanjutan dan bisnis berkelanjutan.
- 2) Membangun budaya kerja yang berkelanjutan di dalam perusahaan.
- 3) Mengembangkan talenta-talenta internal yang dapat menjadi pemimpin dalam bidang keuangan berkelanjutan dan bisnis berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kontribusi program pengembangan SDM terhadap pencapaian tujuan RAKB.

a) Strategi Rencana ke Depan

Untuk mencapai tujuan tersebut, PT Jamkrida Kalsel akan menerapkan beberapa strategi berikut:

- 1) Mengembangkan program pelatihan dan edukasi yang komprehensif dan terstruktur.
- 2) Melibatkan karyawan dalam proses perancangan dan pelaksanaan program pengembangan SDM.
- 3) Memanfaatkan berbagai metode pelatihan dan edukasi yang inovatif dan menarik.
- 4) Bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas program pengembangan SDM.
- 5) Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan efektivitas program pengembangan SDM.
- 6) Meningkatkan anggaran untuk pengembangan SDM
- 7) Mengembangkan tenaga ahli internal
- 8) Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas program pengembangan SDM

b) Program Prioritas:

Berikut adalah beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka pengembangan SDM dalam RAKB PT Jamkrida Kalsel :

- 1) Program pelatihan dasar tentang keuangan berkelanjutan dan bisnis berkelanjutan untuk seluruh karyawan.
- 2) Program pelatihan lanjutan untuk karyawan di bidang-bidang tertentu, seperti Manajemen risiko lingkungan dan sosial, Investasi berkelanjutan dan Pelaporan keuangan berkelanjutan
- 3) Program pengembangan kepemimpinan untuk menumbuhkan pemimpin yang berkomitmen terhadap keberlanjutan.
- 4) Program *mentoring* dan *coaching* untuk membantu karyawan dalam mengembangkan karir mereka di bidang keuangan berkelanjutan dan bisnis berkelanjutan.
- 5) Program-program edukasi dan sosialisasi tentang keuangan berkelanjutan dan bisnis berkelanjutan untuk pemangku kepentingan eksternal.

c) Sumber Daya:

Untuk melaksanakan program-program pengembangan SDM tersebut, PT Jamkrida Kalsel akan mengalokasikan sumber daya yang memadai, baik dalam hal keuangan maupun manusia. PT Jamkrida Kalsel juga akan mencari peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut.

d) Pengukuran Keberhasilan:

Keberhasilan program pengembangan SDM dalam RAKB PT Jamkrida Kalsel akan diukur dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain:

- 1) Tingkat partisipasi karyawan dalam program pelatihan dan edukasi.
- 2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan terkait keuangan berkelanjutan dan bisnis berkelanjutan.
- 3) Perubahan perilaku karyawan yang lebih berkelanjutan.
- 4) Kontribusi program pengembangan SDM terhadap pencapaian tujuan RAKB.

C. Pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor serta pembaharuan teknologi informasi

1. Dasar Pemikiran

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT Jamkrida Kalsel tidak hanya fokus pada aspek lingkungan dan sosial, tetapi juga mencakup aspek tata kelola perusahaan yang baik. Dalam konteks ini, pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor serta pembaruan teknologi informasi (TI) memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi operasional perusahaan. PT Jamkrida Kalsel berkomitmen untuk menerapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam RAKB adalah pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan operasional perusahaan.

Perkembangan teknologi informasi (TI) yang pesat dan tuntutan bisnis yang semakin kompleks mendorong perusahaan penjaminan kredit (perusahaan penjamin) untuk melakukan pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor serta pembaharuan teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan
- b) Meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah
- c) Meningkatkan daya saing perusahaan
- d) Mitigasi risiko keamanan TI

Memenuhi kebutuhan teknologi yang semakin menerapkan AI (*Artificial Intelligence*) dalam setiap proses bisnis. Maka kebutuhan tersebut semakin diperhitungkan untuk mempermudah kinerja teknologi dalam proses bisnis. AI (*Artificial Intelligence*) memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien.

2. Kegiatan

- 1) Proses pertama kali yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi pola sesuai dengan kebutuhan sistem. Proses yang akan diterapkan berada pada sistem keuangan dan akuntansi, yang dimana proses ini akan di integrasi dari sistem penjaminan dan sistem keuangan atau akuntansi. Penerapan ini berupa mempermudah kinerja proses keuangan dalam pengentrian data keuangan atau akuntansi. Proses selanjutnya berada pada proses disposisi dengan alur dan proses yang secara *realtime* akan dapat dimonitoring pada setiap user atau PIC.
- 2) Pengembangan Jaringan Kantor
 - a) Membangun jaringan kantor baru: Membuka kantor baru di lokasi strategis untuk menjangkau lebih banyak nasabah.
 - b) Memperluas jaringan kantor yang ada: Menambah jumlah *workstation* dan perangkat jaringan di kantor yang sudah ada.
 - c) Meningkatkan konektivitas jaringan: Meningkatkan *bandwidth* internet untuk mendukung lalu lintas data yang semakin besar.
 - d) Mengimplementasikan jaringan nirkabel: Memasang jaringan Wi-Fi untuk meningkatkan mobilitas karyawan dan nasabah.
- 3) Pembaharuan Teknologi Informasi
 - a) Mengganti perangkat keras yang sudah usang: Mengganti komputer, server, dan perangkat jaringan dengan yang baru dan lebih modern.
 - b) Memasang perangkat lunak baru: Memasang aplikasi baru untuk mendukung proses bisnis, seperti sistem manajemen kredit, sistem akuntansi, dan sistem *customer relationship management* (CRM).
 - c) Mengembangkan aplikasi internal: Mengembangkan aplikasi internal untuk kebutuhan

khusus perusahaan.

- d) Mengadopsi teknologi cloud computing: Mengadopsi teknologi *cloud computing* untuk meningkatkan skalabilitas, fleksibilitas, dan keamanan TI.

3. Sumber Daya

1) Anggaran

Perusahaan penjamin harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor serta pembaharuan teknologi informasi. Anggaran harus digunakan secara efektif dan efisien.

2) Tenaga Ahli

Perusahaan penjamin harus memiliki tenaga ahli yang kompeten untuk melaksanakan program pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor serta pembaharuan teknologi informasi. Tenaga ahli dapat berasal dari internal perusahaan atau dari luar perusahaan.

3) Vendor

Perusahaan penjamin harus memilih vendor yang terpercaya dan berpengalaman dalam menyediakan layanan pengembangan dan/ atau perubahan jaringan kantor serta pembaharuan teknologi informasi.

Untuk memenuhi kebutuhan proses tersebut, diperlukannya identifikasi pola yang berada di Keuangan dan Akuntansi. Dan proses disposisi juga memerlukan sumber daya seperti perangkat keras (*hardware*). Selain sumber daya berupa perangkat keras (*hardware*), sumber daya lain yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang telah diberikan pelatihan sesuai proses alur bisnis dengan menggunakan proses AI.

4. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi ini mencakup seluruh program pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor serta pembaruan TI yang terkait dengan RAKB PT Jamkrida Kalsel, antara lain:

a) Evaluasi Dampak

Evaluasi dampak dilakukan untuk mengetahui dampak pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor serta pembaharuan teknologi informasi terhadap kinerja perusahaan. Evaluasi dampak dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti survei, wawancara, dan analisis data.

b) Evaluasi Proses

Evaluasi proses dilakukan untuk mengetahui apakah program pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor serta pembaharuan teknologi informasi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Evaluasi proses dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti *checklist*, observasi, dan wawancara.

c) Evaluasi Kepuasan

Evaluasi kepuasan dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan karyawan dan nasabah terhadap pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor serta pembaharuan teknologi informasi. Evaluasi kepuasan dapat dilakukan dengan menggunakan survei.

- d) Evaluasi dalam pelaksanaan ini dilakukan untuk mengetahui sistem AI dapat bekerja pada proses alur yang telah diterapkan. Maka memiliki tahapan yang berupa AIM (Analisis, Identifikasi, dan *Maintenance*). Hal tersebut akan dilakukan berdasarkan kesepakatan dari pelaksanaan yang telah di sepakati.

5. Tantangan dan Rencana ke Depan

Pada pelaksanaan di atas terdapat tantangan yang dihadapi, yaitu :

- 1) *Bug* dan *Error system*.
- 2) Proses tidak sesuai harapan.
- 3) Memperumit pola yang telah ada dalam bisnis.
- 4) Peningkatan kebutuhan akan konektivitas dan *bandwidth*: Jaringan kantor saat ini mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan konektivitas dan *bandwidth* yang semakin meningkat, terutama dengan meningkatnya penggunaan aplikasi berbasis *cloud* dan data besar.
- 5) Keamanan siber: Ancaman keamanan siber semakin canggih, dan jaringan kantor perlu diperkuat untuk melindungi data dan sistem dari serangan.
- 6) Keusangan teknologi: Teknologi informasi (TI) saat ini mungkin sudah usang dan tidak lagi didukung oleh *vendor*. Hal ini dapat menyebabkan masalah kompatibilitas dan kinerja.
- 7) Biaya: Pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor serta pembaharuan TI bisa mahal.

Dari tantangan tersebut rencana yang kedepannya adalah menjadikan semua tantangan tersebut untuk menjadi indentifikasi pola yang lebih sesuai dengan proses penerapan yang lebih baik.

- 1) Mengembangkan dan/atau mengubah jaringan kantor untuk meningkatkan konektivitas dan *bandwidth*. Hal ini dapat mencakup pemasangan kabel serat optik, meningkatkan peralatan jaringan, dan beralih ke layanan *cloud*.
- 2) Meningkatkan keamanan siber dengan menerapkan langkah-langkah seperti *firewall*, sistem deteksi intrusi, dan enkripsi data.
- 3) Memperbarui TI dengan perangkat keras dan perangkat lunak terbaru. Hal ini dapat mencakup pembelian komputer baru, server, dan perangkat lunak.
- 4) Membuat rencana aksi keuangan berkelanjutan untuk mendanai pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor serta pembaharuan TI. Rencana ini harus mencakup perkiraan biaya, sumber pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.
- 5) Mengembangkan tenaga ahli internal.
- 6) Memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional

perusahaan.

- 7) Meningkatkan anggaran untuk pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor serta pembaharuan teknologi informasi.

D. Penyaluran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**1. Dasar Pemikiran**

Perusahaan selain menjalankan aktivitas bisnis, juga harus memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar. Melalui adanya penyaluran dana CSR, adalah sebagai wujud tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Tantangan penyaluran dana CSR adalah bagaimana mengefektifkan penyaluran dana sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, di tengah keterbatasan alokasi anggaran perusahaan.

2. Kegiatan

PT Jamkrida Kalsel, sebagai perusahaan penjaminan kredit, memiliki komitmen untuk melaksanakan TJSL sebagai bagian dari RAKB perusahaan. Kegiatan TJSL ini difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu:

1) Ekonomi:

- Meningkatkan kesejahteraan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan.
- Mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

2) Sosial:

- Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan infrastruktur sekolah, beasiswa pendidikan, dan pelatihan guru.
- Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur kesehatan, penyuluhan kesehatan, dan bantuan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

3) Lingkungan:

- Melestarikan lingkungan hidup melalui program penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan edukasi lingkungan.
- Menerapkan prinsip-prinsip hijau dalam operasional perusahaan.

4) Penyaluran Dana TJSL

PT Jamkrida Kalsel menyalurkan dana TJSL melalui berbagai mekanisme, antara lain:

- Kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM): PT Jamkrida Kalsel bekerja sama dengan LSM untuk melaksanakan program-program TJSL di berbagai bidang.
- Bantuan langsung kepada masyarakat: PT Jamkrida Kalsel memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, seperti bantuan untuk korban bencana alam, bantuan untuk sekolah, dan bantuan untuk rumah ibadah.
- Pelaksanaan program TJSL internal: PT Jamkrida Kalsel juga melaksanakan program TJSL internal, seperti program hemat energi, program pengurangan sampah, dan program edukasi lingkungan bagi karyawan.

3. Sumber Daya

- 1) Sumber Dana : Dana yang digunakan bersumber dari alokasi dana CSR perusahaan yang telah diatur sesuai dengan Kepdir tersendiri.
- 2) Sumber Daya Manusia : Penyaluran dana CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan oleh beberapa unit kerja terkait, yaitu Divisi Akuntansi & Operasional dan Divisi Renbang & Sekper.
- 3) Mitra Kerjasama : Dalam proses penyaluran dana CSR, sesuai dengan ketentuan berlaku yang diatur pada peraturan tersendiri di Perusahaan.

4. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Penyaluran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT Jamkrida Kalsel. PT Jamkrida Kalsel memiliki sistem evaluasi yang komprehensif untuk memantau dan menilai efektivitas pelaksanaan program kegiatan penyaluran dana TJSL pada RAKB perusahaan. Sistem evaluasi ini bertujuan untuk:

- 1) Memastikan bahwa program kegiatan TJSL dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Mengukur dampak program kegiatan TJSL terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 3) Mempelajari dan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan program kegiatan TJSL untuk kemudian dilakukan perbaikan.
- 4) Memberikan informasi dan masukan kepada manajemen PT Jamkrida Kalsel untuk pengambilan keputusan terkait program kegiatan TJSL.

Sistem evaluasi TJSL PT Jamkrida Kalsel terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- 1) Perencanaan evaluasi: Tahap ini meliputi penetapan tujuan evaluasi, indikator kinerja, dan metode pengumpulan data.
- 2) Pelaksanaan evaluasi: Tahap ini meliputi pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan evaluasi.
- 3) Pemanfaatan hasil evaluasi: Tahap ini meliputi penyampaian hasil evaluasi kepada manajemen PT Jamkrida Kalsel dan pemangku kepentingan lainnya, serta tindak lanjut hasil evaluasi.

5. Tantangan dan Rencana ke Depan

1) Tantangan

PT Jamkrida Kalsel, seperti halnya perusahaan lain yang melaksanakan program TJSL, dihadapkan pada beberapa tantangan dalam melaksanakan program kegiatan penyaluran dana TJSL pada RAKB, antara lain:

- a) Keterbatasan dana: Dana yang tersedia untuk program TJSL biasanya terbatas, sehingga perlu dilakukan seleksi program yang tepat dan efektif.

- b) Kurangnya sumber daya manusia: Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola dan melaksanakan program TJSL seringkali menjadi kendala.
- c) Kesulitan dalam mengukur dampak: Mengukur dampak program TJSL terhadap masyarakat dan lingkungan secara objektif dan terukur seringkali sulit dilakukan.
- d) Kurangnya koordinasi dengan pemangku kepentingan: Kurangnya koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi nirlaba, dapat menghambat pelaksanaan program TJSL.
- e) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program TJSL dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan dari masyarakat.

2) Rencana ke Depan

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, PT Jamkrida Kalsel perlu menyusun rencana ke depan yang komprehensif untuk program kegiatan penyaluran dana TJSL pada RAKB. Berikut adalah beberapa rencana yang dapat dilakukan:

- a) Meningkatkan alokasi dana TJSL: PT Jamkrida Kalsel perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan alokasi dana TJSL dalam RAKB perusahaan.
- b) Memperkuat sumber daya manusia: PT Jamkrida Kalsel perlu memperkuat sumber daya manusia untuk mengelola dan melaksanakan program TJSL. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui pelatihan, perekrutan staf baru, atau kerjasama dengan pihak eksternal.
- c) Mengembangkan sistem pengukuran dampak: PT Jamkrida Kalsel perlu mengembangkan sistem pengukuran dampak yang objektif dan terukur untuk program TJSL. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan akademisi, pakar, dan organisasi nirlaba.
- d) Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan: PT Jamkrida Kalsel perlu meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan program TJSL. Hal ini dapat dilakukan dengan (dibuang aja) melalui rapat koordinasi, sosialisasi program, dan pembentukan forum komunikasi.
- e) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: PT Jamkrida Kalsel perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program TJSL. Hal ini dapat dilakukan dengan (dibuang aja) melalui publikasi laporan keuangan dan program TJSL, serta penerapan mekanisme kontrol internal yang efektif.

BAB V

TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

A. Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

PT Jamkrida Kalsel melakukan monitoring secara berkala setiap bulannya melalui pelaporan dari setiap bagian dalam melaksanakan program terkait Aksi Keuangan Berkelanjutan. Adapun hasil yang diharapkan dari penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan:

- Meningkatkan reputasi dan citra perusahaan: Perusahaan yang menerapkan AKB akan dilihat sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan dan sosial. Hal ini dapat meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di mata masyarakat, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Meningkatkan nilai perusahaan: Penerapan AKB dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini karena AKB dapat membantu perusahaan untuk menghemat biaya, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi risiko.
- Meningkatkan akses ke pendanaan: Perusahaan yang menerapkan AKB akan lebih mudah mendapatkan akses ke pendanaan dari investor yang berfokus pada keberlanjutan.
- Meningkatkan kepercayaan dari nasabah: Nasabah akan lebih percaya kepada PT Jamkrida Kalsel karena mengetahui bahwa perusahaan ini berkomitmen terhadap keberlanjutan.
- Meningkatkan loyalitas pelanggan: Pelanggan yang peduli terhadap lingkungan dan sosial akan lebih memilih untuk membeli produk atau jasa dari perusahaan yang menerapkan AKB.
- Meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan: Karyawan yang bekerja di perusahaan yang menerapkan AKB akan merasa lebih bangga dan termotivasi untuk bekerja dengan baik.

2. Bagi Masyarakat:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: AKB dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, seperti program pemberdayaan UMKM, program pendidikan, dan program kesehatan.
- Melestarikan lingkungan hidup: AKB dapat membantu melestarikan lingkungan hidup melalui berbagai program, seperti program penghematan energi dan program pengelolaan sampah.
- Meningkatkan akses terhadap layanan keuangan: AKB dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, seperti layanan kredit produktif dan layanan penjaminan kredit produktif.
- Meningkatkan kualitas hidup: AKB dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program, seperti program pembangunan infrastruktur, program penanggulangan kemiskinan, dan program penyediaan air bersih.

3. Bagi Lingkungan:

- Mengurangi emisi gas rumah kaca: AKB dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca melalui berbagai program, seperti program penggunaan energi terbarukan, program efisiensi energi, dan program pengurangan penggunaan plastik.
- Melestarikan keanekaragaman hayati: AKB dapat membantu melestarikan keanekaragaman hayati melalui berbagai program, seperti program penanaman pohon dan program rehabilitasi hutan.
- Menjaga kelestarian sumber daya alam: AKB dapat membantu menjaga kelestarian sumber daya alam melalui berbagai program, seperti program pengelolaan air dan program pengelolaan.

B. Tindak lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan belum dapat diimplementasikan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan dalam Rencana Bisnis, maka Perusahaan akan melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan Evaluasi

- Mengidentifikasi penyebab: PT Jamkrida Kalsel perlu melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi penyebab RAKB belum terlaksana sesuai rencana. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan RAKB.
- Menentukan hambatan: Setelah mengetahui penyebabnya, PT Jamkrida Kalsel perlu menentukan hambatan-hambatan yang menghambat pelaksanaan RAKB. Hambatan-hambatan ini dapat berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar departemen, atau kurangnya pengetahuan tentang RAKB.
- Mencari solusi: PT Jamkrida Kalsel perlu mencari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah diidentifikasi. Solusi ini dapat berupa penyediaan sumber daya tambahan, peningkatan koordinasi antar departemen, atau pelatihan tentang RAKB.

2. Memperbarui RAKB

- Membuat RAKB yang lebih realistis: Berdasarkan hasil evaluasi, PT Jamkrida Kalsel perlu memperbarui RAKB dengan membuat target yang lebih realistis dan mudah dicapai.
- Memperjelas indikator kinerja: PT Jamkrida Kalsel perlu memperjelas indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RAKB. Hal ini akan membantu perusahaan untuk memantau kemajuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
- Memperkuat komitmen: PT Jamkrida Kalsel perlu memperkuat komitmen manajemen dan karyawan terhadap pelaksanaan RAKB. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi tentang RAKB kepada seluruh karyawan dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi dalam pelaksanaan RAKB.

3. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi

- Membentuk tim RAKB: PT Jamkrida Kalsel perlu membentuk tim RAKB yang terdiri dari perwakilan dari berbagai departemen. Tim ini akan bertanggung jawab untuk koordinasi dan pelaksanaan RAKB.
- Melakukan komunikasi yang efektif: PT Jamkrida Kalsel perlu melakukan komunikasi yang efektif kepada seluruh pemangku kepentingan tentang RAKB. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi, sosialisasi, dan publikasi informasi tentang RAKB.

4. Memantau dan Mengevaluasi Kemajuan

- Memantau kemajuan: PT Jamkrida Kalsel perlu memantau kemajuan pelaksanaan RAKB secara berkala. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- Melakukan evaluasi: PT Jamkrida Kalsel perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RAKB secara berkala untuk melihat apakah RAKB telah terlaksana sesuai rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Melakukan penyesuaian: Jika diperlukan, PT Jamkrida Kalsel perlu melakukan penyesuaian terhadap RAKB berdasarkan hasil evaluasi.

5. Meningkatkan Kapasitas dan Pengetahuan

- Melakukan pelatihan: PT Jamkrida Kalsel perlu melakukan pelatihan kepada karyawan tentang RAKB. Hal ini akan membantu karyawan untuk memahami RAKB dan bagaimana cara melaksanakannya dengan baik.
- Bekerja sama dengan pihak eksternal: PT Jamkrida Kalsel dapat bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau konsultan, untuk mendapatkan bantuan dalam pelaksanaan RAKB.

C. Mitigasi Risiko

Risiko yang dihadapi oleh PT Jamkrida Kalsel terkait dengan pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam merealisasikan kewajiban kepada penerima jaminan sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, dan/ atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan Perusahaan.

JENIS RISIKO PENJAMINAN	BENTUK RISIKO
OPERASIONAL	➤ Rendahnya Pengetahuan terhadap SOP Penjaminan ➤ Server <i>Down</i> (Risiko IT) ➤ <i>Turn Over</i> Karyawan

2. Risiko Penjaminan

Risiko Penjaminan adalah potensi kegagalan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada penerima jaminan sebagai akibat dari ketidakcukupan proses Analisis Risiko, Penetapan Imbal Jasa Penjaminan (*Pricing*), Penggunaan Reasuransi/ Regaransi, dan/atau Penanganan Klaim. Sumber Risiko dari Risiko Penjaminan terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu karakteristik bisnis penjaminan, bauran/ diversifikasi produk, dan struktur reasuransi/regaransi.

JENIS RISIKO PENJAMINAN	BENTUK RISIKO
PENJAMINAN	➤ Risiko Klaim ➤ Risiko Subrogasi ➤ Risiko Kegiatan Usaha Lainnya ➤ Risiko Jumlah Terjamin ➤ Risiko Kualitas Nilai Jaminan ➤ Risiko Piutang Tidak Lancar

3. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum.

JENIS RISIKO PENJAMINAN	BENTUK RISIKO
KEPATUHAN	➤ <i>Fraud</i> ➤ Kasus (Pelanggaran GCG) ➤ Kurangnya Pemahaman terhadap UU & Aturan yang berlaku

4. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka pendek dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.

JENIS RISIKO PENJAMINAN	BENTUK RISIKO
LIKUIDITAS	➤ Ketidakmampuan/keterlambatan Pembayaran Klaim ➤ Keterlambatan Pembayaran Kewajiban ➤ Keterlambatan Pembayaran Tagihan Operasional ➤ <i>Current Ratio</i>

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang

tidak memadai.

JENIS RISIKO PENJAMINAN	BENTUK RISIKO
HUKUM	➤ Perselisihan Terhadap Perjanjian ➤ Gugatan Pengadilan ➤ Gugatan LAPS

6. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko potensi kegagalan Perusahaan untuk mendapatkan keuntungan akibat perubahan dari kondisi pasar, seperti : penurunan pertumbuhan ekonomi, perubahan harga, ketatnya persaingan, bahkan kebijakan pemerintah dll. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko Imbal Jasa Penjaminan, Risiko Suku Bunga, Risiko Nilai Tukar, Risiko Ekuitas, dan Risiko Komoditas.

JENIS RISIKO PENJAMINAN	BENTUK RISIKO
PASAR	➤ Penempatan Investasi /Surat Berharga Negara (SBN) ➤ Penurunan Jumlah Nasabah Penjaminan ➤ Perubahan Harga Pasar Produk Penjaminan

7. Risiko Strategis

Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan Perusahaan dalam mengambil keputusan dan/ atau pelaksanaan keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Strategis antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

JENIS RISIKO PENJAMINAN	BENTUK RISIKO
STRATEGIS	➤ Kurang tepatnya Penyusunan Strategi RKA ➤ Lemahnya RJPP (Recana Jangka Panjang Perusahaan) ➤ Tidak adanya Studi Kelayakan Rencana Strategis

8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*).

JENIS RISIKO PENJAMINAN	BENTUK RISIKO
REPUTASI	➤ Publikasi negatif ➤ Gagal Bayar ➤ Tidak tepat Janji terhadap <i>Service Level Agreement</i> (SLA) ➤ Ketidakpuasan Mitra (PT Jamkrida Kalsel) Risiko Klaim ➤ Prosedur Perusahaan dipandang tidak tepat.

Mengembangkan Alternatif Penanganan Risiko Berdasarkan urutan risiko yang telah disusun, maka proses selanjutnya adalah mengembangkan alternatif penanganan risiko. Secara umum alternatif penanganan risiko dapat berupa :

1) Menghindari risiko (*Avoid*)

Menghindari risiko dapat dilakukan dengan :

- Memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang kemungkinan akan menimbulkan risiko,
- Memilih alternatif lain yang dapat diterima, yang dapat memenuhi sasaran perusahaan,
- Memilih alternatif lain yang proses dan metodologinya berisiko lebih rendah.

2) Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko (*Reduce*).

Tindakan mengurangi atau mengendalikan kemungkinan terjadinya risiko dilakukan melalui :

- Program audit dan ketaatan.
- *Review* atas SOP.
- Inspeksi dan pengendalian operasional.
- Manajemen mutu.
- Pelatihan
- Dan lain-lain.

3) Mengurangi dampak risiko (*Reduce*).

Prosedur untuk mengurangi atau mengendalikan dampak risiko antara lain :

- Rencana pemulihan dampak risiko.
- Perencanaan pengendalian penyimpanan (*fraud*).
- Perencanaan portofolio.
- Mengintensifkan hubungan dengan mitra kerja.

4) Membagi risiko (*Share*).

Dilakukan dengan mengalihkan risiko kepada pihak lain atau membagi sebagian risiko. Mekanisme pengalihan risiko mencakup menggunakan kontrak, perjanjian asuransi, *partnership* atau *joint venture*. Bila risiko dialihkan sebagian atau seluruhnya, perusahaan yang mengalihkan risiko telah memiliki risiko baru, yaitu bila perusahaan tempat pengalihan risiko tidak mengelola risiko secara efektif.

5) Menerima risiko (*Accept*).

Jika tidak ada alternatif yang dapat dilakukan untuk menurunkan eksposur risiko, maka manajemen dapat memutuskan untuk menerima risiko tersebut.

BAB VI

LEMBAR PERSETUJUAN

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHUN 2025 PT JAMKRIDA KALSEL

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan analisis terhadap faktor eksternal dan internal yang mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang Rencana Bisnis Lembaga Penjamin.

Banjarmasin, 28 November 2024



Suyanto
Direktur Utama



Muhammad Hanafiah
Direktur Bisnis

BAB VI

LEMBAR PERSETUJUAN

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHUN 2025 PT JAMKRIDA KALSEL

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan analisis terhadap faktor eksternal dan internal yang mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang Rencana Bisnis Lembaga Penjamin.

Banjarmasin, 28 November 2024



Suyanto
Direktur Utama



Muhammad Hanafiah
Direktur Bisnis